EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN KORBAN BENCANA KEBAKARAN PERMUKIMAN OLEH DINAS SOSIAL DI KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH

Faza Albana
NPP. 33.0016
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik
Email: fazaalbana03@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs., Udaya Madjid, M.Pd
Email: udayamadjid@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *Residential fire disasters are among the most frequent disasters, causing significant material and social losses. Therefore, effective and timely aid distribution is essential to meet the basic needs of victims and accelerate the recovery process.* ***Purpose****: This study aims to analyze the effectiveness of aid distribution for victims of residential fire disasters by the Social Service Agency.* ***Method****: This research employs a qualitative method with a descriptive approachtih with the number of informants being nine informants. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The informants included the Head of the Social Service, Secretary of the Social Service, Head of Social Protection and Security Division, social workers, social welfare staff, Disaster Preparedness Cadet (Tagana) coordinator, village head, and affected community members. Data analysis was conducted using NVivo software to identify key themes.* ***Result****: The results indicate that the effectiveness of aid distribution is influenced by several factors, including timeliness, targeting accuracy, adequacy of aid, and coordination among stakeholders. Although the distribution process has generally been carried out well, several challenges remain, such as limited victim data, delays in distribution, and lack of coordination in the field.* ***Conclusion****: The study concludes that the aid distribution by the Social Service is fairly effective; however, improvements are still needed in data management systems, inter-agency coordination, and resource optimization.*
Keywords: *aid distribution; effectiveness; fire disaster; Social Service*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Bencana kebakaran permukiman merupakan salah satu bencana yang sering terjadi dan menimbulkan kerugian besar, baik secara material maupun sosial. Oleh karena itu, penyaluran bantuan yang tepat dan efektif sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban serta mempercepat proses pemulihan. **Tujuan**: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyaluran bantuan bagi korban bencana kebakaran permukiman oleh Dinas Sosial. **Metode**: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jumlah informan ada sembilan informan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Sosial, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, koordinator Taruna Siaga Bencana (Tagana), kepala desa, dan masyarakat terdampak. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo untuk mengidentifikasi tema-tema utama. **Hasil/Temuan**: Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran

bantuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ketepatan waktu penyaluran, ketepatan sasaran, kecukupan bantuan, serta koordinasi antar pihak terkait. Meskipun secara umum penyaluran bantuan telah berjalan dengan baik, masih terdapat kendala seperti keterbatasan data korban, keterlambatan distribusi, serta kurangnya koordinasi di lapangan. **Kesimpulan**: Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penyaluran bantuan oleh Dinas Sosial sudah cukup efektif, namun masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan sistem pendataan, peningkatan koordinasi antar instansi, serta optimalisasi sumber daya yang ada.
Kata kunci: bencana kebakaran; Dinas Sosial; efektivitas; penyaluran bantuan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap berbagai bencana, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, dan kebakaran (Heryati, 2020). Kebakaran dapat terjadi akibat faktor alam maupun faktor manusia, seperti korsleting listrik, penggunaan kompor gas yang tidak aman, instalasi listrik yang buruk, puntung rokok, serta lemahnya sistem pengamanan bangunan (Haq, 2024). Di Indonesia, kebakaran permukiman sering terjadi terutama pada kawasan padat penduduk yang memiliki bangunan mudah terbakar dan tingkat kesadaran keselamatan yang masih rendah (Fauzia dkk., 2022). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian material, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat dan mengancam keselamatan jiwa (Herlina, 2024). Permukiman merupakan lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat (Sunarti, 2019). Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan lahan permukiman semakin besar, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas. Kondisi ini mendorong munculnya kawasan permukiman yang padat dan rentan terhadap kebakaran (Sitanggang dkk., 2022). Data Kabupaten Aceh Besar tahun 2024 menunjukkan bahwa beberapa kecamatan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran permukiman.

Risiko tersebut semakin besar karena masih banyak bangunan yang menggunakan material mudah terbakar, seperti kayu dan bangunan semi permanen. Selain itu, akses jalan yang sempit sering menghambat proses pemadaman dan penyaluran bantuan kepada korban (Valen & Silvitasari, 2024). Berdasarkan data BPBA tahun 2024, kebakaran permukiman menjadi bencana yang paling sering terjadi di Aceh dengan 86 kejadian. Di Kabupaten Aceh Besar, jumlah kebakaran selama periode 2020–2024 mengalami fluktuasi, namun masih menunjukkan bahwa ancaman kebakaran perlu mendapat perhatian serius. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Namun, proses penyaluran bantuan kepada korban masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakakuratan data penerima, verifikasi yang belum optimal, serta koordinasi antarinstansi yang kurang efektif (Hidayatullah, 2023). Bahkan, Aceh Besar tercatat memiliki berbagai permasalahan administratif bantuan sosial, termasuk data penerima yang tidak valid dan bantuan yang belum tersalurkan secara optimal (Azisan dkk., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas penyaluran bantuan korban bencana kebakaran permukiman oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan bantuan, hambatan yang dihadapi, serta upaya peningkatan pelayanan agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap)*

Penelitian ini berfokus pada kesenjangan antara kondisi ideal penyaluran bantuan bencana yang seharusnya berlangsung secara tepat sasaran, tepat waktu, dan merata, dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar. Kesenjangan tersebut termanifestasi dalam beberapa permasalahan konkret yang penulis temukan. Pertama, dari sisi data dan verifikasi, terdapat 1.315 penerima bantuan yang tercatat belum menerima haknya, ditemukan data penerima yang tidak valid, serta sejumlah masyarakat terdampak yang tidak memperoleh bantuan sama sekali. Kondisi yang bahkan memicu perhatian langsung dari Menteri Sosial dan pengawasan Ombudsman RI (Azisan dkk., 2024). Kedua, dari sisi ketepatan waktu, proses administrasi penetapan Surat Keputusan Bupati sebagai syarat pencairan bantuan material membutuhkan waktu tiga minggu hingga satu bulan sejak kejadian bencana, menyebabkan korban tidak segera mendapatkan bantuan pada saat paling membutuhkan (Hidayatullah, 2023). Ketiga, dari sisi koordinasi antarinstansi, sinergi antara Dinas Sosial, BPBD, pemerintah kecamatan, dan perangkat desa belum berjalan secara optimal, sehingga identifikasi korban dan distribusi bantuan di lapangan masih mengalami hambatan yang berulang.

Kesenjangan ini semakin nyata jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Siti Muthmainnah (2022) mengkaji efektivitas penanggulangan kebakaran dari sisi operasional pemadam kebakaran di Kota Langsa, sementara Sabila Wetania (2023) membahas strategi distribusi bantuan bencana banjir. Wildan Seni (2024) berfokus pada mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat, sedangkan Niken Seftiani (2022) menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan bencana sosial secara umum. Ibrahim dkk. (2022) serta Zainal (2020) menyoroti pentingnya validitas data dan koordinasi distribusi bantuan sosial, namun tidak secara spesifik pada konteks kebakaran permukiman. Dengan demikian, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas penyaluran bantuan korban bencana kebakaran permukiman oleh Dinas Sosial di Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan kerangka teori efektivitas organisasi Duncan yang mencakup dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Kesenjangan empiris dan teoritis inilah yang menjadi landasan utama dilaksanakannya penelitian ini.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini perlu dilakukan karena kebakaran permukiman masih sering terjadi di Kabupaten Aceh Besar dan menimbulkan dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Faktor seperti kepadatan penduduk, kondisi rumah yang berdekatan, serta akses wilayah yang terbatas turut meningkatkan risiko dan menyulitkan proses penanganan. Dalam praktiknya, penyaluran bantuan kepada korban masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain ketidakakuratan data penerima, keterlambatan distribusi, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana bantuan yang diberikan telah berjalan secara tepat dan sesuai kebutuhan korban. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung proses pemulihan korban secara lebih efektif dan berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini disusun dengan merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang membahas penanggulangan bencana, distribusi bantuan sosial, dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat terdampak bencana. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa

pelaksanaan bantuan bencana masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sarana dan sumber daya, serta masalah keakuratan data penerima bantuan. Meskipun memiliki tema yang sama, setiap penelitian menggunakan pendekatan dan fokus kajian yang berbeda. Penelitian yang dilakukan Siti Muthmainnah (2022) menyoroti efektivitas penanggulangan kebakaran permukiman dan menemukan adanya kendala pada fasilitas pendukung, koordinasi lembaga, serta aspek regulasi. Sementara itu, Sabila Wetania (2023) mengkaji strategi penyaluran bantuan banjir dan menemukan hambatan berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan kondisi geografis. Penelitian lain oleh Wildan Seni (2024), dan Niken Seftiani (2022) menunjukkan bahwa distribusi bantuan dan implementasi kebijakan kebencanaan belum berjalan optimal karena berbagai faktor kelembagaan dan sumber daya. Selain itu, penelitian Ibrahim dkk. (2022), Hidayatullah (2023), dan Zainal (2020) menegaskan pentingnya validitas data penerima bantuan serta koordinasi yang baik dalam mendukung kelancaran distribusi bantuan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus mengkaji efektivitas penyaluran bantuan korban kebakaran permukiman oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dengan fokus pada ketepatan sasaran, ketepatan waktu, kecukupan bantuan, dan koordinasi pelaksanaannya

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian Siti Muthmainnah (2022) berfokus pada efektivitas penanggulangan kebakaran dari sisi operasional pemadam kebakaran, Sabila Wetania (2023) mengkaji strategi distribusi bantuan bencana banjir, Wildan Seni (2024) menekankan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat, serta Niken Seftiani (2022) menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan bencana sosial secara umum. Berbeda dengan keseluruhan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji efektivitas penyaluran bantuan korban bencana kebakaran permukiman oleh Dinas Sosial, dengan tiga aspek kebaruan yang membedakannya. Pertama, dari segi teori, penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi Duncan dalam karya Steers yang menganalisis tiga dimensi yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi sebagai kerangka analisis penyaluran bantuan pascabencana kebakaran, sebuah pendekatan yang belum digunakan dalam penelitian serupa sebelumnya. Kedua, dari segi metode, penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak NVivo 12 untuk pengodean dan analisis data kualitatif secara sistematis, yang memberikan rigor analitik lebih tinggi dibandingkan analisis manual yang digunakan penelitian terdahulu. Ketiga, dari segi karakteristik objek dan kebijakan, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Besar yang memiliki kekhasan berupa permasalahan administrasi bantuan sosial yang telah mendapat perhatian langsung Menteri Sosial dan pengawasan Ombudsman RI, sehingga temuan penelitian ini memiliki urgensi kebijakan yang konkret dan terukur bagi perbaikan sistem penyaluran bantuan bencana di daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyaluran bantuan korban bencana kebakaran permukiman oleh Dinas Sosial di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas penyaluran bantuan bagi korban bencana kebakaran permukiman oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar. Fokus kajian diarahkan pada ketepatan sasaran penerima bantuan, ketepatan waktu penyaluran, koordinasi antarinstansi, serta berbagai

hambatan yang muncul selama pelaksanaan bantuan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara lebih rinci melalui pengalaman, pandangan, dan keterlibatan para pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan penyaluran bantuan. Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi yang terjadi di lapangan secara sistematis dan faktual. Lokasi penelitian berada di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana kebakaran permukiman. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan yang mencakup kegiatan observasi lapangan, wawancara dengan informan, pengumpulan dokumen pendukung, serta pengolahan dan analisis data.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan karena informan yang dipilih memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam proses penyaluran bantuan sehingga dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar karena memiliki tanggung jawab teknis yang berkaitan langsung dengan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana kebakaran permukiman. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, Pekerja Sosial Ahli Muda, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Koordinator Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Aceh Besar, kepala desa, serta masyarakat yang terdampak bencana kebakaran permukiman. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti laporan kegiatan, dokumen resmi instansi, data kebencanaan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan kebencanaan dan bantuan sosial.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai proses penyaluran bantuan dan berbagai kendala yang dihadapi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan bantuan di lapangan, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data melalui arsip, laporan, foto kegiatan, dan dokumen administrasi lainnya. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian lapangan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12. Proses analisis diawali dengan memasukkan seluruh data penelitian ke dalam aplikasi, yang mencakup hasil wawancara, catatan observasi, serta dokumen pendukung lainnya. Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan proses coding untuk mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan efektivitas penyaluran bantuan korban bencana kebakaran permukiman.

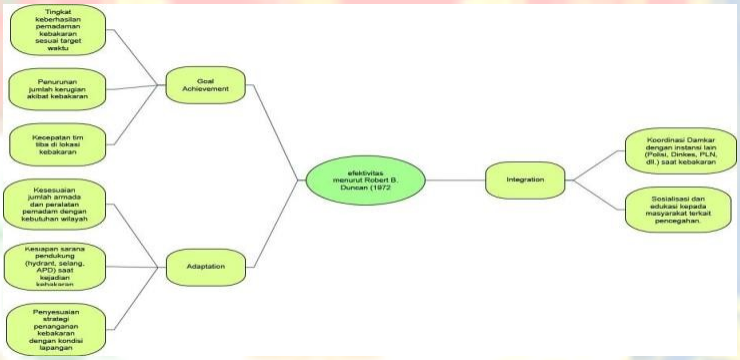
Data yang telah dikodekan kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penggunaan NVivo 12 membantu peneliti dalam mengorganisasi data, mengidentifikasi pola dan hubungan antartema, serta mempermudah interpretasi hasil penelitian mengenai efektivitas penyaluran bantuan korban kebakaran permukiman di Kabupaten Aceh Besar. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun temuan dan rekomendasi penelitian. Penyusunan metode dan sistematika penulisan juga diselaraskan dengan kaidah administrasi pemerintahan serta pedoman penulisan karya ilmiah IPDN (Madjid, 2023; Peraturan Rektor IPDN Nomor 2 Tahun 2025).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian lapangan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12. Proses analisis diawali dengan memasukkan seluruh data penelitian ke dalam aplikasi, yang mencakup hasil wawancara, catatan observasi, serta dokumen pendukung lainnya. Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan proses koding untuk mengelompokkan informasi berdasarkan tema, subtema, dan kategori yang relevan dengan indikator dalam teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Tahap berikutnya adalah melakukan analisis data secara lebih mendalam melalui berbagai fitur yang tersedia pada NVivo 12. Fitur Text Search Query dimanfaatkan untuk menelusuri kata, frasa, atau istilah tertentu yang muncul dalam data penelitian.

Hasil penelusuran tersebut kemudian disajikan dalam bentuk Word Tree sehingga hubungan antar kata dapat terlihat dengan lebih jelas. Selain itu, fitur Word Frequency Query digunakan untuk mengidentifikasi kata-kata yang paling sering muncul dalam data. Hasil analisis frekuensi kata tersebut divisualisasikan melalui Word Cloud dan Tree Map guna mempermudah pemahaman terhadap fokus pembahasan yang dominan. Untuk mendukung interpretasi data, peneliti juga memanfaatkan fitur Project Map dan Hierarchy Chart. Kedua fitur tersebut membantu menggambarkan hubungan antar kategori, tema, serta pola yang muncul dari hasil penelitian secara sistematis.

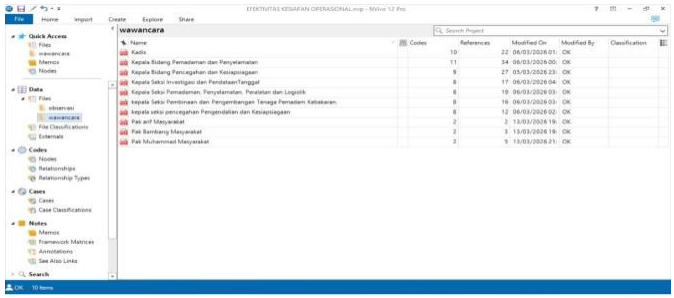
Gambar 1.
Mind Map Teori Efektivitas Organisasi



Sumber: (Diolah oleh Penulis Menggunakan NVivo 12, 2026)

Berdasarkan Gambar 1. teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian adalah teori efektivitas organisasi Duncan dalam karya Richard M. Steers. Teori tersebut menjelaskan bahwa efektivitas organisasi dilihat melalui tiga dimensi utama, yaitu: Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Teori Duncan digunakan sebagai dasar dalam proses koding data pada aplikasi NVivo 12. Codes merupakan proses pengelompokan data penelitian dengan memberikan kategori tertentu pada data yang relevan. Proses koding dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam Parent Codes yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Selanjutnya, setiap dimensi diuraikan kembali ke dalam Child Codes berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian. Penggunaan perspektif efektivitas pada pelayanan publik juga relevan dengan kajian mengenai kecepatan respons layanan pemadaman yang menekankan pentingnya capaian waktu, koordinasi, dan hasil layanan bagi masyarakat (Madjid dkk., 2025).

Gambar 2.
Sumber Data Penelitian yang Diimpor ke dalam NVivo 12

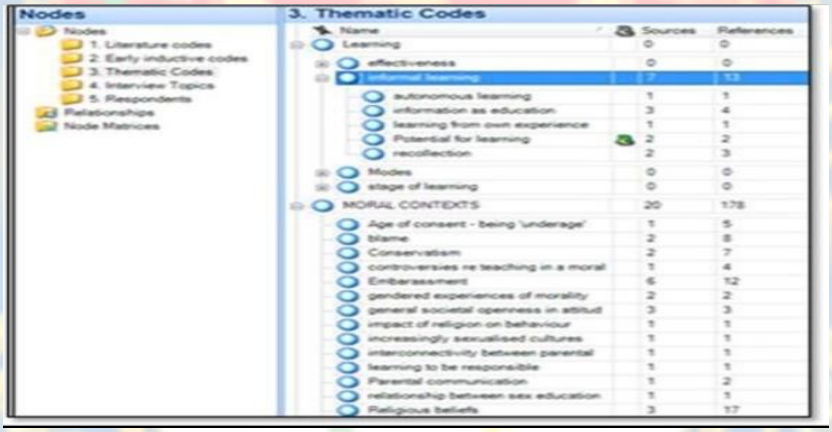


Sumber: (Diolah Oleh Penulis Menggunakan NVivo 12, 2026)

Berdasarkan Gambar 2. data penelitian yang telah dikumpulkan diimpor ke dalam NVivo 12 untuk keperluan analisis. Data tersebut dikelompokkan ke dalam dua folder utama, yaitu folder wawancara yang berisi transkrip hasil wawancara dan folder observasi yang memuat catatan hasil pengamatan lapangan. Setelah seluruh data diimpor, dilakukan proses pengodean data. Tahapan ini penting dalam analisis data kualitatif karena memudahkan penulis dalam menyusun, memilah, dan mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu sehingga pola, tema, dan hubungan yang berkaitan dengan fokus penelitian dapat ditemukan. Pengodean dilakukan dalam bentuk kode atau node secara sistematis menggunakan teori efektivitas organisasi Duncan sebagai dasar utama analisis.

Gambar 3.

Olahan Codes pada NVivo 12



Sumber: (Diolah Oleh Penulis Menggunakan NVivo 12, 2026)

Berdasarkan Gambar 3, proses koding dalam NVivo 12 disusun dengan mengacu pada teori efektivitas organisasi Duncan yang terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu Adaptasi, Integrasi, dan Pencapaian Tujuan. Ketiga dimensi tersebut dijadikan sebagai Parent Codes untuk mengelompokkan data hasil wawancara dan observasi yang berkaitan dengan efektivitas penanggulangan bencana kebakaran permukiman di Kabupaten Aceh Besar. Pada dimensi Adaptasi, terdapat beberapa Child Codes yang meliputi kesesuaian jumlah armada, kesiapan sarana pendukung, serta penyesuaian strategi penanganan kebakaran. Sementara itu, dimensi Integrasi mencakup koordinasi antarinstansi serta kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Adapun dimensi Pencapaian Tujuan memuat indikator kecepatan tim dalam merespons kejadian, penurunan tingkat kerugian akibat kebakaran, dan keberhasilan penanganan kebakaran di lapangan.

Gambar 4.

Word Cloud Kata yang Sering Digunakan



Sumber: (Diolah Oleh Penulis Menggunakan NVivo 12, 2026)

Gambar 5.
Summary Kata yang Sering Digunakan dalam Data

Word	Length	Count	Weighted Percentage (%)
kebakaran	9	211	4,20
pemadam	7	82	1,63
dilakukan	9	78	1,55
petugas	7	67	1,33
dapat	5	65	1,29
kejadian	8	59	1,18
bagaimana	9	58	1,16
lokasi	6	56	1,12
kami	4	55	1,10
lapangan	8	52	1,04
pemadaman	9	52	1,04
waktu	5	51	1,02
penanganan	10	45	0,90
peralatan	9	45	0,90
laporan	7	42	0,84

Summary | Word Cloud | Tree Map | Cluster Analysis

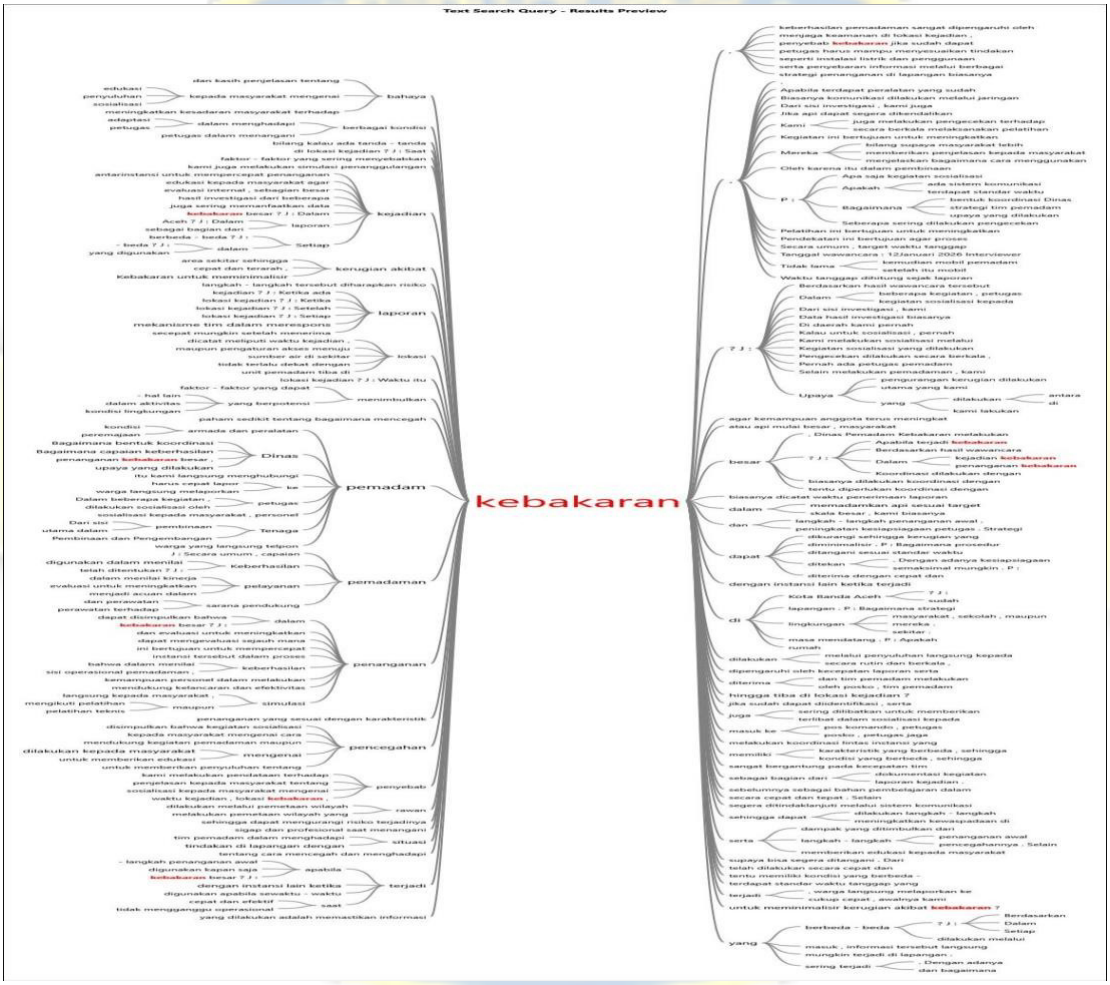
Sumber: (Diolah Oleh Penulis Menggunakan NVivo 12, 2026)

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Gambar 4 dan Gambar 5, kata "kebakaran" merupakan kata yang paling sering muncul dalam data penelitian. Kata tersebut ditemukan sebanyak 211 kali dengan persentase sebesar 4,20% dari keseluruhan kata yang dianalisis. Tingginya frekuensi kemunculan kata ini menunjukkan bahwa kebakaran menjadi tema utama yang paling banyak dibahas oleh para informan selama proses wawancara dan pengumpulan data. Temuan ini sejalan dengan fokus penelitian yang mengkaji penanganan kebakaran permukiman dan berbagai upaya yang dilakukan oleh instansi terkait dalam merespons kejadian tersebut. Selain kata "kebakaran", terdapat beberapa kata lain yang juga memiliki tingkat kemunculan cukup tinggi. Kata "pemadam" muncul sebanyak 82 kali (1,63%), diikuti kata "dilakukan" sebanyak 78 kali (1,55%), "petugas" sebanyak 67 kali (1,33%), dan "dapat" sebanyak 65 kali (1,29%). Selanjutnya, kata "kejadian" tercatat sebanyak 59 kali (1,18%), "bagaimana" sebanyak 58 kali (1,16%), "lokasi" sebanyak 56 kali (1,12%), serta "kami" sebanyak 55 kali (1,10%). Sementara itu, kata "lapangan" dan "pemadaman" masing-masing muncul sebanyak 52 kali atau 1,04%.

Selain kata-kata yang memiliki frekuensi kemunculan tinggi, ditemukan pula istilah lain seperti "waktu", "penanganan", "peralatan", dan "laporan" yang cukup sering digunakan oleh informan selama wawancara. Kemunculan kata-kata tersebut menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya berfokus pada kejadian kebakaran, tetapi juga mencakup proses penanganan, penggunaan sarana pendukung, serta mekanisme pelaporan yang dilakukan ketika terjadi kebakaran. Visualisasi Word Cloud pada Gambar 5 menunjukkan bahwa kata "kebakaran", "pemadam", "petugas", dan "pemadaman" memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan kata lainnya. Ukuran yang lebih besar mengindikasikan bahwa kata-kata tersebut lebih sering muncul dalam data penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa informan banyak membahas peristiwa kebakaran, kegiatan pemadaman, serta peran petugas dalam menangani keadaan darurat di lapangan. Selain itu, pembahasan juga berkaitan dengan upaya penanganan dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak. Untuk memperdalam hasil analisis, peneliti menggunakan fitur Text Search Query pada NVivo 12. Fitur ini digunakan untuk

menelusuri kemunculan kata tertentu dalam berbagai konteks data penelitian. Melalui analisis tersebut, peneliti dapat memahami hubungan antar konsep dan pola pembahasan yang muncul dari hasil wawancara. Hasil Text Search Query kemudian disajikan dalam bentuk Word Tree sehingga keterkaitan antar kata dan konteks penggunaannya dapat terlihat lebih jelas. Visualisasi ini membantu peneliti dalam melakukan interpretasi data secara lebih terstruktur dan mendalam.

Gambar 6.
Word Tree Penggunaan Kata "Kebakaran"



Sumber: (Diolah Oleh Penulis Menggunakan NVivo 12, 2026)

Berdasarkan Gambar 6. kata "kebakaran" menjadi pusat Word Tree yang memiliki berbagai cabang kalimat dari seluruh sumber data penelitian. Cabang tersebut menunjukkan penggunaan kata "kebakaran" dalam konteks penanganan kejadian, pemadaman, pelaporan kejadian, hingga upaya pencegahan kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Visualisasi tersebut menunjukkan bahwa kata "kebakaran" sering digunakan dalam konteks penerimaan laporan, respons cepat tim menuju lokasi kejadian, dan tindakan pemadaman oleh petugas. Selain itu, penanganan kebakaran dipengaruhi oleh kondisi lokasi kejadian, ketersediaan sarana dan peralatan pemadam, serta koordinasi antarpetugas di lapangan.

Kata “kebakaran” juga digunakan dalam konteks pelaporan kejadian oleh masyarakat, di mana masyarakat dapat melaporkan kejadian secara langsung kepada petugas pemadam kebakaran agar tim segera merespons kejadian tersebut. Selain itu, setiap kejadian kebakaran didokumentasikan dalam bentuk laporan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan petugas. Word Tree juga menunjukkan bahwa kata “kebakaran” sering dikaitkan dengan upaya pencegahan, seperti sosialisasi kepada masyarakat, penyuluhan penyebab kebakaran, dan edukasi langkah pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meminimalisir risiko kebakaran. Dengan demikian, berdasarkan hasil visualisasi Word Tree, kata “kebakaran” digunakan dalam berbagai konteks yang menggambarkan kesiapan operasional Dinas Sosial mulai dari penerimaan laporan, respons menuju lokasi kejadian, pelaksanaan pemadaman, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas penyaluran bantuan bencana di Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan hasil analisis menggunakan NVivo 12 melalui Word Frequency Query dan Text Search Query, diperoleh gambaran bahwa fokus pembahasan dominan dalam penelitian ini berkaitan dengan “kebakaran”, “pemadam”, “petugas”, “lokasi”, dan “penanganan”. Melalui Word Tree, terlihat bahwa kata “kebakaran” digunakan dalam berbagai konteks yang menggambarkan proses penyaluran bantuan oleh Dinas Sosial, mulai dari penerimaan laporan masyarakat, keberangkatan tim menuju lokasi kejadian, hingga kegiatan pencegahan kebakaran melalui sosialisasi kepada masyarakat. Temuan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas organisasi Duncan.

3.1 Efektivitas Penyaluran Bantuan Korban Bencana Kebakaran Permukiman Oleh Dinas Sosial di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar merupakan instansi teknis yang melaksanakan kegiatan administrasi, layanan informasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi serta berupaya memanfaatkan sumber dana dan sarana secara maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar telah melaksanakan penyaluran bantuan terhadap berbagai jenis bencana seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta angin puting beliung. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada bencana kebakaran permukiman di Kabupaten Aceh Besar untuk mengetahui efektivitas penyaluran bantuan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Kedudukan Dinas Sosial sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan sosial sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, sistem pemerintahan Indonesia, serta perlindungan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat (Labolo, 2014; Supriatna dkk., 2025; Sutiyo & Fadhilah, 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Berdasarkan hasil penelitian, kebakaran permukiman yang terjadi pada 25 Februari 2025 merupakan salah satu kejadian terbesar dan memberikan dampak besar terhadap masyarakat sekitar. Untuk mendukung penelitian, penulis melakukan pengambilan data terkait penyaluran bantuan korban kebakaran permukiman di Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Aceh Besar tahun 2025, terdapat empat kecamatan yang terdampak langsung, yaitu Kecamatan Lhoong, Kecamatan Leupung, Kecamatan Kota Cut Gile, dan Kecamatan Kota Jantho.

Tabel 1.
Data Kelompok Rentan Bencana

No	Kategori	Jumlah
1	Bayi	641
2	Balita	2442
3	Ibu Hamil	339

4	Ibu Nifas	80
5	Ibu Menyusui	979
6	Lansia	3943
7	Disabilitas	3
8	Odgj	30
	Total	**8457 Jiwa**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan Tabel 1. kelompok rentan terbesar di Kabupaten Aceh Besar adalah lansia sebanyak 3.943 jiwa, disusul balita sebanyak 2.442 jiwa dan ibu menyusui sebanyak 979 jiwa. Sebagian besar masyarakat Aceh Besar bekerja sebagai petani dan pekebun sehingga sangat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, kebakaran menjadi bencana yang paling dikhawatirkan karena dapat merusak lahan, menghambat aktivitas ekonomi, serta memengaruhi kehidupan masyarakat.

A. Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan

Proses penentuan penerima bantuan di Kabupaten Aceh Besar dilakukan melalui mekanisme verifikasi berjenjang dari tingkat Gampong (Desa). Data penerima bantuan diverifikasi oleh perangkat desa dan tim teknis untuk menentukan tingkat kerusakan rumah, baik rusak berat maupun rusak sedang. Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang sering muncul adalah adanya korban yang tinggal di tanah wakaf atau tanah sengketa tanpa dokumen resmi sehingga proses verifikasi bantuan menjadi lebih sulit.

B. Ketepatan Waktu Penyaluran

Ketepatan waktu menjadi aspek penting dalam penyaluran bantuan karena kondisi cuaca ekstrem di Aceh Besar sering menghambat proses distribusi bantuan. Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran bantuan material masih menunggu penetapan Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai daftar penerima bantuan. Proses administrasi tersebut membutuhkan waktu sekitar tiga minggu hingga satu bulan sejak kejadian bencana sehingga menyebabkan keterlambatan penyaluran bantuan kepada korban.

C. Sosialisasi dan Pemantauan

Sosialisasi dilakukan melalui perangkat Gampong untuk menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan bersifat stimulan atau bantuan pemicu, bukan pengganti seluruh kerugian korban. Berdasarkan hasil penelitian, bantuan yang diberikan berupa bahan bangunan seperti seng, kayu, dan semen. Dalam proses pembangunan kembali rumah korban, masyarakat dilibatkan melalui kegiatan gotong royong (meuseuraya) karena biaya tenaga kerja tidak ditanggung pemerintah sehingga masyarakat ikut berperan aktif dalam proses pembangunan.

D. Efektivitas Berdasarkan Indikator Ketepatan Sasaran

Penyaluran bantuan di Kabupaten Aceh Besar dinilai cukup efektif dari aspek ketepatan sasaran. Keterlibatan perangkat Gampong seperti Keuchik dan Tuha Peut membantu memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar terdampak. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam kebijakan bantuan permanen atau semi permanen, khususnya bagi masyarakat yang hanya menyewa rumah sehingga belum memperoleh bantuan secara optimal.

E. Efektivitas Berdasarkan Ketepatan Waktu

Berdasarkan indikator ketepatan waktu, penyaluran bantuan dinilai kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh mekanisme administrasi penganggaran dana tak terduga (BTT) yang cukup panjang dan kaku. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Aceh Besar dengan jarak antarkecamatan yang jauh menyebabkan koordinasi distribusi material sering terkendala, termasuk keterbatasan stok bahan dari vendor yang bekerja sama dengan pemerintah.

F. Analisis Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak masyarakat yang tinggal di lahan tanpa sertifikat resmi dan hanya memiliki alas hak adat. Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi bantuan menjadi lebih lambat dan rumit. Selain itu, keterbatasan anggaran Dinas Perkim menyebabkan bantuan belum mampu menjangkau seluruh korban, terutama ketika kebakaran besar terjadi lebih dari satu kali dalam satu tahun. Hal ini menjadi hambatan dalam penanganan pascabencana bagi masyarakat terdampak.

3.2 Pencapaian Tujuan

Dimensi pencapaian tujuan dalam teori efektivitas organisasi Duncan mengacu pada sejauh mana organisasi berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks penyaluran bantuan korban kebakaran permukiman, pencapaian tujuan diukur melalui ketepatan sasaran penerima bantuan, ketepatan waktu penyaluran, serta sosialisasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar.

a. Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan
   Proses penentuan penerima bantuan di Kabupaten Aceh Besar dilakukan melalui mekanisme verifikasi berjenjang dari tingkat Gampong (Desa). Data penerima bantuan diverifikasi oleh perangkat desa dan tim teknis untuk menentukan tingkat kerusakan rumah, baik rusak berat maupun rusak sedang. Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang sering muncul adalah adanya korban yang tinggal di tanah wakaf atau tanah sengketa tanpa dokumen resmi sehingga proses verifikasi bantuan menjadi lebih sulit. Penyaluran bantuan di Kabupaten Aceh Besar dinilai cukup efektif dari aspek ketepatan sasaran. Keterlibatan perangkat Gampong seperti Keuchik dan Tuha Peut membantu memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar terdampak. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam kebijakan bantuan permanen atau semi permanen, khususnya bagi masyarakat yang hanya menyewa rumah sehingga belum memperoleh bantuan secara optimal.
b. Ketepatan Waktu Penyaluran
   Ketepatan waktu menjadi aspek penting dalam penyaluran bantuan karena kondisi cuaca ekstrem di Aceh Besar sering menghambat proses distribusi bantuan. Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran bantuan material masih menunggu penetapan Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai daftar penerima bantuan. Proses administrasi tersebut membutuhkan waktu sekitar tiga minggu hingga satu bulan sejak kejadian bencana sehingga menyebabkan keterlambatan penyaluran bantuan kepada korban. Berdasarkan indikator ketepatan waktu, penyaluran bantuan dinilai kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh mekanisme administrasi penganggaran dana tak terduga (BTT) yang cukup panjang dan kaku. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Aceh Besar dengan jarak antarkecamatan yang jauh menyebabkan koordinasi distribusi material sering terkendala, termasuk keterbatasan stok bahan dari vendor yang bekerja sama dengan pemerintah.
c. Sosialisasi dan Pemantauan
   Sosialisasi dilakukan melalui perangkat Gampong untuk menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan bersifat stimulan atau bantuan pemicu, bukan pengganti seluruh kerugian korban. Berdasarkan hasil penelitian, bantuan yang diberikan berupa bahan bangunan seperti seng, kayu, dan semen. Dalam proses pembangunan kembali rumah korban, masyarakat dilibatkan melalui kegiatan gotong royong (meuseuraya) karena biaya tenaga kerja tidak ditanggung pemerintah sehingga masyarakat ikut berperan aktif dalam proses pembangunan.

d. Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan
   Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak masyarakat yang tinggal di lahan tanpa sertifikat resmi dan hanya memiliki alas hak adat. Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi bantuan menjadi lebih lambat dan rumit. Selain itu, keterbatasan anggaran Dinas Perkim menyebabkan bantuan belum mampu menjangkau seluruh korban, terutama ketika kebakaran besar terjadi lebih dari satu kali dalam satu tahun. Hal ini menjadi hambatan dalam penanganan pascabencana bagi masyarakat terdampak.

Berdasarkan dimensi pencapaian tujuan, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar secara umum telah berupaya mencapai sasaran penyaluran bantuan dengan melibatkan perangkat Gampong dalam verifikasi data dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terdampak. Namun, keterlambatan administrasi, keterbatasan anggaran, dan permasalahan kepemilikan lahan masih menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan secara optimal.

3.3 Integrasi

Dimensi integrasi dalam teori efektivitas organisasi Duncan merujuk pada kemampuan organisasi untuk membangun komunikasi, kerja sama, dan sinergi antarunit atau antarinstansi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam penyaluran bantuan korban kebakaran permukiman, dimensi integrasi tercermin dari koordinasi Dinas Sosial dengan berbagai pihak terkait, keterlibatan masyarakat, serta dukungan logistik yang terpadu. Dalam konteks logistik kebencanaan, integrasi juga berkaitan dengan kemampuan jejaring bantuan sosial, rantai pasok kemanusiaan, dan strategi lokasi bantuan untuk menjaga efisiensi, pemerataan, serta efektivitas respons bencana (Gutjahr dkk., 2021; Rueda-Velasco dkk., 2025; Zhang dkk., 2021).

a. Koordinasi Antarinstansi dalam Penyaluran Bantuan
   Pada saat terjadi kebakaran, Dinas Sosial bersama Tim Reaksi Cepat BPBD langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi masyarakat dan memberikan bantuan darurat. Bantuan yang diberikan berupa tenda darurat, dapur umum, dan kebutuhan pokok bagi korban kebakaran permukiman. Koordinasi antara Dinas Sosial, BPBD, pemerintah kecamatan, dan perangkat Gampong menjadi kunci dalam mempercepat penyaluran bantuan. Dalam konteks dimensi integrasi, kemampuan organisasi untuk menyelaraskan sumber daya dan membangun kerja sama lintas lembaga menjadi faktor penentu efektivitas penyaluran bantuan.
b. Penyediaan Bantuan Darurat dan Dukungan Logistik
   Penyediaan bufferstock bahan pangan, tenda darurat, dan dapur umum merupakan bentuk integrasi antara Dinas Sosial dengan pihak-pihak terkait dalam memenuhi kebutuhan dasar korban bencana. Survei lapangan dilakukan untuk mengetahui titik lokasi kejadian agar tim dapat bergerak lebih cepat menuju lokasi bencana dan meminimalisir keterlambatan distribusi bantuan. Model distribusi bantuan darurat menegaskan bahwa ketersediaan logistik, pemetaan kebutuhan, dan kecepatan pengiriman merupakan unsur penting dalam memperkuat penyaluran bantuan kepada korban bencana (Matam & Harikrishna, 2025).
c. Keterlibatan Masyarakat dan Tagana
   Taruna Siaga Bencana (Tagana) berperan penting dalam mendukung integrasi proses penyaluran bantuan di lapangan. Masyarakat juga dilibatkan secara aktif melalui kegiatan gotong royong (meuseuraya) sebagai wujud integrasi antara pemerintah dan komunitas dalam proses pemulihan pascabencana kebakaran permukiman.

Berdasarkan dimensi integrasi, pelaksanaan tanggap darurat sudah dilakukan secara maksimal oleh BPBD dan Dinas Sosial, namun masih belum sepenuhnya efektif akibat keterbatasan fasilitas pendukung dan koordinasi yang belum optimal dalam beberapa situasi di lapangan.

3.4 Adaptasi

Dimensi adaptasi dalam teori efektivitas organisasi Duncan mengacu pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi lingkungan, tantangan teknis, dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks penyaluran bantuan korban kebakaran permukiman, adaptasi tercermin dari upaya Dinas Sosial dalam merespons berbagai kendala pasca bencana melalui rehabilitasi, rekonstruksi, dan penyesuaian strategi penanganan secara berkelanjutan. Kemampuan adaptasi organisasi dalam situasi bencana perlu didukung oleh kesiapan kapasitas, pengelolaan kerentanan sosial, dan penyesuaian strategi distribusi agar bantuan dapat menjangkau kelompok terdampak secara lebih tepat (Gutjahr dkk., 2021; Zhang dkk., 2021).

a. Adaptasi Melalui Survei Verifikasi dan Rehabilitasi Pascabencana
   Survei dilakukan untuk memastikan lokasi kejadian dan mempercepat penanganan pascabencana.
b. Identifikasi dan Verifikasi Kerusakan
   Pendataan dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan yang dialami masyarakat, mulai dari kerusakan ringan hingga berat.
c. Pengendalian Terpadu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
   Kegiatan ini dilakukan untuk memperbaiki lingkungan dan bangunan yang rusak akibat kebakaran.

Berdasarkan dimensi adaptasi, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar telah berupaya menyesuaikan strategi penanganan pascabencana melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, proses tersebut masih membutuhkan waktu cukup lama karena harus mengikuti prosedur administrasi pemerintah daerah. Pendataan kerusakan yang belum optimal menyebabkan beberapa kerusakan tidak tercatat dengan baik sehingga ada masyarakat yang belum memperoleh bantuan sesuai tingkat kerusakan rumahnya. Diperlukan peningkatan kapasitas adaptasi organisasi melalui perbaikan sistem pendataan dan penyederhanaan prosedur administrasi dalam situasi darurat bencana.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori efektivitas organisasi Duncan melalui tiga dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, penyaluran bantuan bagi korban bencana kebakaran permukiman oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar secara umum telah berjalan cukup efektif. Efektivitas tersebut terlihat dari kemampuan Dinas Sosial dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak sesuai dengan kebutuhan dasar pascabencana. Selain itu, efektivitas penyaluran bantuan didukung oleh adanya koordinasi antara Dinas Sosial, BPBD, pemerintah gampong, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan masyarakat dalam proses pendataan, verifikasi, hingga distribusi bantuan kepada korban bencana.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Siti Muthmainnah (2022) yang menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan kebakaran dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga serta kesiapan sarana pendukung. Kesamaan tersebut terlihat pada pentingnya koordinasi antaraktor dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program kebencanaan. Dalam penelitian ini, koordinasi antara Dinas Sosial, pemerintah gampong, BPBD, dan Tagana menjadi faktor yang mendukung kelancaran proses penyaluran bantuan

kepada korban kebakaran permukiman. Dengan demikian, baik penelitian ini maupun penelitian Siti Muthmainnah sama-sama menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga merupakan unsur penting dalam mewujudkan efektivitas penanganan bencana.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sabila Wetania (2023) yang menyatakan bahwa strategi distribusi bantuan yang terencana dapat menjadikan proses penyaluran bantuan lebih terarah dan sistematis. Kesamaan tersebut tercermin dari adanya mekanisme pendataan, verifikasi, dan penetapan penerima bantuan yang dilakukan sebelum bantuan disalurkan kepada masyarakat terdampak. Proses tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bantuan diterima oleh pihak yang berhak sesuai tingkat kerusakan yang dialami.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan, antara lain keterlambatan proses administrasi, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, validitas data penerima bantuan, keterbatasan anggaran, serta permasalahan status kepemilikan lahan yang dimiliki sebagian korban. Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian Niken Seftiani (2022) yang menyebutkan bahwa keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi faktor penghambat dalam pelayanan penanggulangan bencana. Kesamaan tersebut terlihat pada masih ditemukannya berbagai kendala yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan program bantuan, meskipun secara umum program tetap dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Wildan Seni (2024). Penelitian Wildan Seni berfokus pada mitigasi bencana dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan penggunaan alat pemadam kebakaran, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada korban kebakaran permukiman setelah bencana terjadi. Oleh karena itu, apabila penelitian Wildan Seni menekankan aspek pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum terjadinya bencana, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek respons dan pemulihan pascabencana melalui mekanisme pendataan, verifikasi, koordinasi, serta distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Perbedaan fokus tersebut menghasilkan temuan yang berbeda, namun keduanya sama-sama memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan penanganan bencana kebakaran secara menyeluruh.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa efektivitas penyaluran bantuan korban bencana kebakaran permukiman di Kabupaten Aceh Besar turut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya meliputi adanya koordinasi antara Dinas Sosial, Tagana, pemerintah desa, dan masyarakat dalam proses distribusi bantuan serta keterlibatan aparat setempat dalam pendataan korban. Namun demikian, masih terdapat faktor penghambat seperti keterbatasan data korban yang akurat, akses jalan menuju lokasi kebakaran yang sempit, keterbatasan sarana pendukung, serta kurang optimalnya koordinasi di lapangan yang menyebabkan keterlambatan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas penyaluran bantuan korban bencana kebakaran permukiman oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar telah berjalan cukup baik dan mampu membantu meringankan beban masyarakat terdampak, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan logistik, kurangnya sosialisasi prosedur, serta hambatan transportasi, komunikasi, administrasi, dan koordinasi antarinstansi yang menyebabkan keterlambatan distribusi bantuan. Upaya peningkatan efektivitas telah dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah desa, relawan, dan instansi

terkait, tetapi masih diperlukan perbaikan dalam pendataan korban, koordinasi, dan sistem penyaluran agar bantuan dapat disalurkan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di Kabupaten Aceh Besar serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan terbatas. Selain itu, penelitian masih terkendala pada keterbatasan data korban dan koordinasi antarinstansi dalam proses penyaluran bantuan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan pada wilayah lain dengan cakupan yang lebih luas serta menggunakan metode yang lebih beragam agar memperoleh hasil yang lebih mendalam terkait efektivitas penyaluran bantuan korban bencana kebakaran permukiman. Penelitian berikutnya juga dapat meneliti pengembangan sistem pendataan dan koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan bencana

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan bantuan selama pelaksanaan penelitian. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya* (Edisi Revisi). RajaGrafindo Persada.

Madjid, U. (2023). *Pengantar Ilmu Administrasi*. PT. Pustaka Interes Media.

Madjid, U., Iksan, M. G., & Situmorang, A. (2025). Efektivitas Program Response Time 7 Menit Layanan Pemadaman Gratis (Roti 7 Lapis) di Kota Surabaya. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), 7(2), 148–166.

Supriatna, D., Madjid, U., & Ismail. (2025). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Alqaprint Jatinangor.

Sutiyo, & Fadhilah, H. A. (2024). *Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.

JURNAL

Gutjahr, W. J., Nolz, P. C., & Pichler, A. (2021). Building disaster preparedness and response capacity in humanitarian supply chains using the social vulnerability index. *European Journal of Operational Research*, 292(1), 250–275. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.10.016

Matam, Y., & Harikrishna, M. (2025). Development of a relief distribution model for emergency logistics. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 15(1), 89–108. https://doi.org/10.1108/JHLSCM-10-2024-0131

Rueda-Velasco, F., Amaya, J., & Jaller, M. (2025). Leveraging social assistance networks for enhanced disaster response logistics. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 131, 105906. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105906

Sitanggang, I. S., Syaufina, L., Trisminingsih, R., Ramdhany, D., Nuradi, E., Hidayat, M. F. A., Rahmawan, H., & Wulandari. (2022). Indonesian Forest and Land Fire Prevention Patrol System. *Fire*, 5(5), 136. https://doi.org/10.3390/fire5050136

Seftiani, N. (2022). *Implementasi kebijakan penanggulangan bencana sosial pada korban terdampak kebakaran di Kota Palembang* [Skripsi, Universitas Sriwijaya]. Repository Universitas Sriwijaya.https://repository.unsri.ac.id/74230/55/RAMA_63201_07011381823139_0009065801_0022106803_01_front_ref.pdf

Muthmainnah, S. (2022). *Efektivitas penanggulangan bencana kebakaran permukiman di Kota Langsa Provinsi Aceh*. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/8630

Zhang, Y., Liu, M., Shen, S., & Zhang, X. (2021). The efficiency, equity and effectiveness of location strategies in humanitarian logistics. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 156, 102521. https://doi.org/10.1016/j.tre.2021.102521

Hidayatullah, N. (2023). Analisis Kepentingan Distribusi Bantuan Sosial bagi Korban Bencana Sosial-Kemanusiaan. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 7(2), 112–125. https://doi.org/10.31219/osf.io/jkbs2023

Ibrahim, M. A., Hidayat, E., & Alexander, H. (2022). Conflict Resolution of Social Assistance Distribution during the Disaster Recovery Process. *International Journal of Arts and Social Science*, 5(4), 41–49. http://www.ijassjournal.com/2022/V5I4/41-49.pdf

Seftiani, N. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Sosial Pascabencana Kebakaran oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 14(3), 201–214. https://doi.org/10.31942/jiks.v14i3.7112

Seni, W. (2024). Mitigasi Bencana dan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Ancaman Kebakaran Rumah Tangga. *Jurnal Riset Kebencanaan Indonesia*, 10(1), 12–25. https://doi.org/10.32678/jrki.v10i1.9482

Wetania, S. (2023). Strategi Distribusi Logistik dan Bantuan Darurat Penanganan Korban Bencana Alam. *Jurnal Logistik Darurat*, 3(2), 77–89. https://doi.org/10.24156/jld.v3i2.8831

Zainal, M. I. (2020). Analisis Koordinasi Distribusi Bantuan Sosial dalam Penanganan Bencana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 8(1), 45–58. https://doi.org/10.31289/jips.v8i1.3241

Zein, M. H. M., & Septiani Sisca. (2021). *Evaluasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran Oleh Pemerintah Kecamatan*. 2(2). https://doi.org/10.55606/jass.v2i2.1021

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Rektor IPDN Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penulisan Karya Ilmiah Program Sarjana Terapan IPDN.